



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Temuan BPK, Dinas Angsur TPTGR Rp 80 Juta

KOTA MANNA - Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menemukan kelebihan bayar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bengkulu Selatan (BS) sebesar Rp 1,3 miliar. Dari jumlah itu, baru Rp 80 juta yang dibayar dari Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).

Adanya temuan lebih bayar di OPD tersebut, sama seperti tahun sebelumnya. Dinas ini menjadi salah satu langganan adanya bayar atas proyek yang dikerjakan pada tahun anggaran sebelumnya. Dan untuk tahun anggaran 2022, hitungan BPK lebih bayar di OPD itu mencapai Rp 1,3 miliar.

Sebelumnya tahun pada tahun 2020 dan 2021 juga juga terdapat kelebihan dengan dana mencapai Rp 1 miliar. Dan terkait dengan temuan kelebihan bayar ditahun anggaran 2022 di Dinas PUPR BS, Inspektur Inspektorat Kabupaten

BS Hamdan Syarbaini menyebut sudah ada progres pembayaran kelebihan bayar tersebut. Namun diakui Hamdan dari temuan Rp 1,3 miliar tersebut baru dibayar sebesar Rp 80 juta.

"Informasi yang kami terima dari Kepala Dinas PUPR, pihak Dinas akan bekerja sama dengan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan untuk penanganan," kata Hamdan.

Hamdan mengingatkan kepada seluruh pihak ketiga atau kontraktor yang belum menyetor TPTGR tahun 2022, agar segera menyetor sebelum 60 hari sejak keluarnya hasil LHP BPK RI. "Jika sampai tanggal 14 Juni 2023 belum dilunasi, maka akan diproses secara hukum," tandasnya.

Sementara itu, TPTGR lainnya juga ditemukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) BS yang mencapai Rp 600 juta lebih. **(tek)**